GAYA KEPEMIMPINAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI MEMBANGUN CIMAHI *CYBER CITY*

Maulana Sape'i

Abstrak

Cimahi merupakan Kota yang sangat minim akan Sumber Daya Alam, oleh karena itu pemerintah Kota Cimahi mencanangkan konsep Pembangunan Cimahi *Cyber City*. Untuk menunjang pemanfaatan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi agar Kota Cimahi mempunyai daya saing, namun masyarakat beranggapan Konsep Cimahi Cyber City masih belum cocok dengan kondisi masyarakat pada saat ini.

Studi ini mengenai gaya kepemimpinan pemerintah Kota Cimahi mengacu pada teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Veithzal Riva'i, Muliaman dan Mansyur, dimana gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar yaitu Pelaksanaan Tugas, Hubungan Kerjasama dan Hasil yang dicapai. Untuk melihat keberhasilan gaya kepemimpinan pemerintah dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* maka penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka, observasi pada lokasi penelitian yaitu, kepada Kepala Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi dan melakukan wawancara terhadap 15 narasumber sebagai perwakilan masyarakat Kota Cimahi serta 5 narasumber dari aparatur Kota Cimahi.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang gaya kepemimpinan pemerintah kota cimahi dalam pembangunan Cimahi *Cyber City*, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pembangunan Cimahi *Cyber City* tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya pemerintah membangun Cimahi *Cyber City* masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Pemerintah Kota Cimahi belum dapat membuat aturan yang baku dalam pembangunan Cimahi *Cyber City*, kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat serta pemerintah dengan pemerintah belum dapat dimaksimalkan dengan baik sehingga pembangunan Cimah *Cyber City* masih terkendala salah satunya masyarakat yang belum faham tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta tingkat kepuasan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* belum cukup terpenuhi.

\

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Cimahi *Cyber City*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) dan (2) menyatakan bawha:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah merup akan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daer ah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otono mi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua n Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD Tahun 1945. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup lima fungsi pokok yaitu pemberdayaan, pelayanan, pembangunan, pengaturan dan keamanan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dibentuknya UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) Indonesia sangat mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya, namun pemerintah pusat yang berada di Ibu Kota Jakarta sulit untuk mengkoordinasi seluruh pemerintahan yang berada di daerah karena alasan jarak dan waktu yang cukup panjang untuk menjangkau daerah – daerah tersebut. Pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya tidak akan optimal jika tidak di dukung oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat membuat membuat kebijakan publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Adanya asas otonomi, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengurusi pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat termasuk dalam mengelola keuangan, kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia, atas alasan itulah pemerintah pusat membentuk peraturan bagi pemerintah daerah yang berbentuk Undang – Undang (UU) dengan nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaanya ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya pengembangan pembangunan

daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah daerah yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom harus memperhatikan sumber daya yang mempunyai daya saing agar pembangunan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memajukan suatu daerah maupun pemerintahan. Jalannya suatu pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin sebagai kepala daerah. Pemimpin merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin dan kepemimpinan, erat kaitannya dengan SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa. Bangsa ini masih membutuhkan pemimpin yang kuat di berbagai sektor kehidupan masyarakat, pemimpin yang berwawasan kebangsaan dalam menghadapi permasalahan bangsa yang demikian kompleks dan menurut peneliti kepemimpinan merupakan salah satu isu yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga saat ini.

Media massa elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas tentang kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Peranan pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam kemajuan atau kemunduran suatu daerah, demikian juga kemajuan atau kemunduran suatu daerah biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin, dalam menjalankan pemerintahan, seorang kepala daerah kerap menggunakan gaya kepemimpinannya untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya.

Seorang pemimpin biasanya menggunakan gaya kepemimpinan sebagai pola yang di pakai untuk mengendalikan pegikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepala daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan mengelola sumber daya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya Pembangunan SDM dapat berupa produk maupun jasa untuk pengembangan pembangunan daerah salah satunya pengembangan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan *E-Goverenment* (elektronik pemerintahan) hal ini merupakan upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan *system* manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

yang dapat diaplikasikan pada pemerintahan pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Indonesia telah memiliki beberapa daerah yang berhasil mengembangkan *E-Goverenment* yaitu Bandung salah satunya *Smart Goverment* dengan meng-*upgread* sistem di pemerintahan dari *paper* ke *paperless* dengan sistem informasi yang *user friendly*, Surabaya sebagai kota yang memenangkan ajang *Smart City Award* 2011 yakni *Smart Environment, Smart Living*, dan *Smart Governance*, Makassar dengan *Smart Hospital*, menambahkan perangkat sensor pada pasien *(location tracking devices)* dan papan status yang ditempatkan diruang tunggu untuk melacak keberadaan pasien *(electronic status board).*

Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang sedang berusaha membangun *E-Government* dengan pembangunannya yang diberi nama Cimahi *Cyber City* hal merupakan gagasan yang di bentuk oleh Walikota Cimahi pada tahun 2005 yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan Cimahi *Cyber City* banyak menemukan hambatan. Hal ini dapat dipengaruhi dari berbagai aspek mulai dari kurangnya fasilitas, regulasi yang kurang mengikat maupun cara kepemimpinan pemerintah Kota Cimahi dalam membangun Cimahi *Cyber City* yang kurang tepat.

Pada latar belakang ini, karena Walikota Cimahi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap pembangunan Pasar Atas Baru. Sehingga peneliti memilih untuk meneliti Wakil Walikota Cimahi sebagai kepala daerah yang mewakili walikota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi sebagai badan yang menyusun perencanaan pembangunan Kota Cimahi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Panjang, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Keasrispan dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi yang memiliki kewenangan pembangunan Kota Cimahi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melaksnakan pelayanan terhadap masyarakat serta membangun komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui perangkat lunak agar lebih efektif dan efisien serta mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan sehingga dampaknya dapat menghemat biaya pembelian kertas.

Beberapa produk yang dibuat oleh pemeirntah Kota Cimahi yaitu Pesduk (Pesan Singkat Penduduk) dan Simrenda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah). Kedua sistem tersebut dikelola oleh Diskominfoarpus dan Bappeda, pesduk dan Simrenda merupakan dua sistem yang digunakan pemerintah Kota Cimahi untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat melalui sistem yang dibuat guna mendukung pembangunan Cimahi *Cyber City*.

Pesduk merupakan suatu sarana pengaduan yang menjadi andalan di Kota Cimahi, selain itu pesduk juga merupakan suatu bentuk inovasi yang ada di Jawa Barat khususnya dalam bidang pelayanan pengaduan. Berdasarkan arsip yang peneliti temukan dari Diskominfoarpus Pesduk ini dibuat bertujuan sebagai berikut, yaitu membantu masyarakat terhubung dan berbagi informasi melalui pesan singkat sms kepada pemerintah Kota Cimahi, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan koordinasi antar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, memangkas birokrasi, mendukung UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, meningkatkan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat, sebagai alat ukur untuk melihat kecendrungan keluhan masyarakat serta partisipasi pengawasan kinerja aparatur untuk terwujudnya *Good Governance*.

Pesduk hadir dengan memanfaatkan sarana yang sudah familiar di masyarakat, yaitu melalui nomor telepon seluler 081221700800 dan pemanfaatan ruang publik di dunia maya yaitu sebuah alamat *website*. Ruang publik ini sengaja di ciptakan oleh Pemerintah Kota Cimahi dengan tujuan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Ruang publik menjadi syarat utama yang harus ada agara terciptanya partisipasi masyarakat dan mendukung terwujudnya Cimahi sebagai kota *Cyber*. Simrenda merupakan salah satu sistem yang dijalankan oleh Bappeda Kota Cimahi untuk memantau perencaraan dan pembangunan di Kota Cimahi yang melibatkan unsur masyarakat dari tingkat Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota. Simrenda dibentuk atas dasar kebutuhan pemerintah Kota Cimahi agar dapat lebih semua unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan.

Berjalannya pembangunan Cimahi *Cyber City* sangat bergantung terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kepada bawahan atau seluruh pengikutnya. Pembangunan Cimahi sebagai kota *Cyber* dapat terealisasi dengan baik apabila pelaksanaan tugas yang jelas sesuai dengan peraturan dan pemilihan Sumber Daya Manusia yang tepat dapat dilaksanakan dengan baik, hubungan kerjasama yang baik antar SKDP maupun pihak swasta dapat membantu terlaksananya pembangunan tersebut dengan baik dan hasil yang dicapai pun sesuai dengan yang harapan dan tujuan pemerintah dalam membangun Cimahi sebagai kota *Cyber*.

Selain itu, pembangunan BITC (*Baros Informastion Technology Creative*) sebagai pusat pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi yang menjadi salah satu ikon dari pembangunan Cimahi *Cyber City* belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini terjadi karena pembangunan BITC belum seluruhnya selesai. Kawasan Baros yang telah dipersiapkan sebagai pusat pengembangan bisnis belum mampu menunjukan geliatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

kota, khususnya ekonomi berbasis TIK.

Adanya berita tersebut bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Cimahi belum sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang terjadi, pelaksanaan tugas yang baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah, hubungan kerjasama yang dibangun antara antara pemerintah, pihak swata maupun masyarakat harus dibangun dengan baik kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemeirntah Kota Cimahi terhadap masyarakat mengenai Cimahi *Cyber City* sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti, banyak masyarakat yang belum memahami manfaat terhadap pembangunan Cimahi *Cyber City*. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mutlak dilakukan seiring dengan berkembangnya zaman, Kota Cimahi membuat program menuju kota *Cyber* masih belum sempurna terutama dalam hal penyediaan fasilitas terkait pembangunan teknologi informasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah yaitu "Bagaimana gaya kepemimpinan Pemerintah Kota Cimahi membangun Cimahi *Cyber City* dilihat dari tiga pola dasar yaitu pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama dan hasil yang dicapai?"

Maksud dan Tujuan Penelitan

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gaya kepemimpinan Pemerintah Kota Cimahi membangun Cimahi *Cyber City*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan pemerintah kota Kota Cimahi dilihat dari aspek pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama dan hasil yang dicapai dalam membangun Cimahi *Cyber City*.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan penelitian ini bagi peneliti yaitu yang dilakukan diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang gaya kepemimpinan pemerintah Kota Cimahi membangun Cimahi *Cyber City*.
2. Hasil penelitian ini secara teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *literature* bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Cimahi sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam membangun Cimahi *Cyber City*.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemimpin

Pemimpin dalam kamus bahasa Indonesia disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan,

pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kepemimpinan dan memimpin pada mulanya berasal dari kata pimpin. Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda.

Pemimpin merupakan suatu peran dalam sistem tertentu baik organisasi pemerintahan, organisai non formal maupun organisasi swasta yang berupa perusahaan, karenanya seseorang didalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang, oleh karena itu kepemimpinan dapat dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Sudria Munawar menjelaskan bahwa pemimpin yaitu "Seseorang yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".(Munawar,2006:14).
Seorang pemimpin pantas memberikan contoh loyalitas atau kesetiaan terhadap pimpinan atau pekerjaan maupun sifatnya dalam kebaikan sehingga memberikan efek nyaman antara pemimpin dan pengikut, serta memberikan pengetahuan dan pengetahuan yang luas terhadap bawahan/ pengikut agar dapat bekerja dengan baik, dalam prakteknya permasalahan dalam suatu pekerjaan sering kali terjadi oleh karena itu pemimpin dituntut untuk dapat memecahkan masalah dan memebri nasehat terhadap bawahan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, serta pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya agar salah satunya dengan memberikan contoh disiplin waktu agar kualitas kinerja bawahan dapat meningkat.

Kepemimpinan

Definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa – peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas – aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dari orang – orang di luar kelompok atau organisasi.

Menurut Ishak Arep dan Tanjung bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda manuju pencapaian tertentu. Jadi kepemimpinan *(leadership)* ini merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin *(leader)*, yang dalam penerapannya mengandung konsekuensi terhadap diri dalam penerapannya mengandung konsekuensi terhadap

diri si pemimpin, antara lain sebagai berikut :

1. Harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat (*decision making*)
2. Harus berani menerima resiko sendiri
3. Harus berani menerima tanggung jawab sendiri (*The Principle of Absolutenes of Responsibility*).

(Arep, 2003:93)

Kepemimpinan tekadang dipahami sebagai keuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/ sukacita. Ada beberapa faktor yang menggerakan orang, yaitu karena acnaman, penghargaan, otoritas dan pembujukan. Kedudukan dan peranan seorang pemimpin sangat penting dalam mengarahkan dan menggerakkan bawahannya untuk mau dan mampu bekerja aktif dan efektif guna mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas – aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal in yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuaasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

(Riva'i, 2014:2)

Seorang tidak akan disebut sebagai tanpa adanya bawahan maupun pengikut tidak akan disebut, hal ini penting karena pemimpin pada dasarnya diakui bukan mengakui. Seorang pemimpin harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat terlakasan dengan baik, untuk mencapai tujuan organisai. Pendristribusian jabatan atau kelompok tugas antara pemimpin dan pengikut sangat penting bagi berjalannya suatu organisasi agar tujuan yang dicapai dapat dilaksanakan dengan baikse cara efektif dan efisien. Seorang pemimpin menjadi salah satu contoh atau panutan bagi bawahannya, oleh karena itu pemimpin dituntut untuk menggunakan kekuasannya terhadap bawahanny sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bawahan itu sendiri, apabila pemimpin tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh bawahan maka organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu kepemimpinan tidak terlepas dari hubungan antara pemimpin dan pengikut, dalam melaksanakan tugasnya pemimpin harus dapat membagi kekuasaan agar hal akan dicapai terlaksana dengan baik, karena seorang pemimpin

bukanlah seorang *superman* yang dituntut dapat melaksanakan tugas oraganisasi seorang diri, melainkan seorang pemimpin harus dapat membentuk *super team* agar semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena menurut Riva'i itu kepemimpinan pada hakikatnya adalah:

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
2. Seni memperngaruhi dan megarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercaayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.
3. Kemampuan untuk memperngaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut dan situasi tertentu.
5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
   (Riva'i, 2014:3)

Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan secara harfian berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya. Wahjosumidjo 2005: 17 berpendapat bawaha:

> "kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat- sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang legitimasi pengaruh." (Wahjosumidjo, 2005: 17)

Kepemimpina harus mencerminkan sifat yang baik, perilaku pribadi yang dapat dijadikan suri teladan, berpengaruh terhadap orang lain, memiliki pola dasar kepemimpinan, interaksi yang baik terhadap semua orang, dapat membagi peran sesuai edngan bidang keahliannya. Sedangkan Miftah Thoha mengemukakan bahwa kepemimpinan yaitu: "kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok". (Thoha, 2010:9).

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk

memperbaiki kelompok dan budayanya. Menurut Young dalam bukunya Kartini Kartono yang berjudul Pemimpn dan Kepemimpinan mengartikan, kepemimpinan sebagai berkut:

> Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. (Kartono, 2003:23)

Menurut Kartini Kartono mengemukakan kepemimpinan sebagai berikut:

> Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitasaktivitas tertentu, dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri- ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan, serta cocok-pas dengan situasi dan zamannya. (Kartono, 2003:48)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan dengan karakteristik tententu sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang pemimpin salah satunya tergantung dengan teknik kepemimpinan yang dilakukan dalam menciptakan situasi sehingga menyebabkan orang yang dipimpinnya timbul kesadarannya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Dengan kata lain, efektif atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi tersebut.

Gaya Kepemimpinan

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memperngaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.

Gaya kepemimpinan merupakan pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan gaya kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuang bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil

dari kombinasi dari falsafah, keterampilan sikap, sifat yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Sehingga kepemimpinan yang tepat adalah sutau gyaa yang dapat dimaksimumkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Menurut Veithzal Riva'i, Muliaman, dan Mansyur dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi mengatakan bahwa, "Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang mmentingkan hubungan kerja sama dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai".(Riva'i, 2014:42)

Veithzal Riva'i dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi mengatahan pada tahun 1930-an ada yang berpendapat bahwa gaya kepemimpinan sebagai suatu rangkaian kesatuan yang didasarkan pada derajat pembagian kekuasaan dan pengaruh antara pimpinan dan bawahan. Rangkaian tersebut dapat diidentifikasi empat gaya kepemimpinan dasar, yaitu mengatakan, menjual, konsultasi dan bergabung. Mengatakan merupakan gaya kepemimpinan otokratis, sedangkan bergabung yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Menurut pendapat ini yaitu gaya kepemimpinan demokratis bukanlah pendekatan kepemimpinan yang terbaik dalam semua situasi, mereka lebih menyarankan penggunaan semua gaya, mulai dari mengatakan sampai bergabung.

Untuk menentukan gaya yang paling efektif dalam menghadapi keadaan tertentu maka perlu mempertimbangkan kekuatann yang ada dalam tiga unsur yaitu dari pemimpin, bawahan dan situasi yang menyeluruh. Tahun 1960-an berkembang teori kepemimpinan yang dinamakan "pola manajerial". Kepemimpinan dipengaruhi oleh dua perhatian menejerial yang mendasar, yaitu perhatian terhadap produksi/ tugas dan perhatian terhadap manusia. Menurut teori ini ada empat gaya mendasar kepemimpinan:

1. Gaya manajemen tugas, pemimpin menunjukan perhatian tinggi terhadap produksi, tetapi perhatian rendah terhadap manusia.
2. Gaya manajemen *country club,* pemimpin memperlihatkan perhatian yang tinggi terhadap manusia, tetapi perhatian rendah terhadap produksi.
3. Gaya manajemen miskin, pemimpin tidak terlalu menunjukkan perhatian, baik terhadap produksi maupun manusia.
4. Gaya manajemen tim, pemimpin menunjukan perhatian tinggi baik terhadap produksi maupun terhadap manusia.

(Riva'i 2014:43)

Sementara itu, menurut *Contingency Theory Leadership* menyatakan bahwa ada kaitan antara gaya kepemimpinan dengan situasi tertentu yang dipersyaratkan. Menurut teori ini seorang pemimpin

akan efektif jika gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang terjadi. Pendekatan ini menyarankan bahwa diperlukan dua perangkat perilaku untuk kepemimpina yang efektif, yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan. Kedua perangkat ini akan melagirkan dua gaya kepemimpinan, yaitu:

1. Mengarahkan, gaya kepemimpinan ini perilaku tugas tinggi, perilaku hubungan rendah.
2. Menjual, perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama tinggi.
3. Ikut serta, perilaku tugas rendah sedangkan perilaku tugas tinggi.
4. Mendelegasikan, baik perilaku tugas maupun perilaku hubungan kerja sama rendah.

(Riva'i 2014:44)

Sedangkan pakar manajemen modern berpendapat bahwa gaya kepemimpinan yang tepat adalah suatu gaya yang dapat menyatukan tiga variabel situasional, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas dan posisi kekuasaan sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang terbaik adalah jika posisi kekuasaan itu moderat.

Pengertian *E-Government*

UNDP *(United Nation Development Programme)* dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, "*E-Government* yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT- Information and Communication Technology) oleh pihak pemerintahan". Seiring berkembangnya zaman manusia dituntut untuk terus berkembang dan mengikuti zaman, begitu pula dengan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, teknologi pun harus menjadi solusi yang efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, adanya *E-Government* merupakan salah satu perkembangan bagi suatu daerah guna menjalankan pemerintahannya, termasuk Kota Cimahi yang berupaya membangun Cimahi *Cyber City* guna mengembangkan daerahnya dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berbeda dengan UNDP *(United Nation Development Programme),* Indrajit dalam bukunya yang berjudul Membangun Aplikasi *E-Government* berpendapat bahwa: *"E-Government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan." (Indrajit 2002:36).

Pembangunan Cimahi *Cyber City* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan *E-Government,* serta mendukung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 huruf a dan b: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan

proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public, serta mendorong part isipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat menkmati pelayanan berbasis Teknologi dari pemerintah Kota Cimahi, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia di pihak aparatur pemerintahan, swasta maupun masyarakatnya sendiri yang berpotensi dan mempunyai keahlian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Manfaat *E-Government*

Menurut Tjahjanto, "manfaat terpenting dari implementasi e-Government adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab *(accountable)* bagi warganya" (Tjahjanto 2003:254). Selain itu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Indrajit manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan trasnparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak - pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis.
   (Indrjit, 2002:5)

Cyber City

Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini menjadi salah satu poin penting yang tak terpisahkan dalam program pengembangan suatu daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerh untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan membangun *Cyber City*.

Wacana *Cyber City* di Indonesia mulai mengemuka pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an yaitu dengan disahkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2001. Akan tetapi proses implementasi dari Inpres tersebut sampai sekarang belum direalisasikan. Di lain pihak ada sebagian kalangan industri mendirikan pusat-pusat pengembangan *software/hardware* dilingkungan industrinya yang mereka sebut dengan *cyber city* meski pada kenyataannya masih jauh dari definisi *cyber city* itu sendiri. *Cyber city* yang mereka istilahkan untuk kegiatan mereka sangatlah berbeda dengan apa yang telah ada di negara lain seperti *cyber city* di Korea atau Taiwan. Selain itu belum adanya aturan atau regulasi yang jelas menjadikan industri pengembang melakukan inisiatif mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri karena mereka menyadari begitu banyak potensi dari *Cyber City* ini.

Cyber City merupakan salah satu konsep kota modern berbasis Teknologi Informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di dunia. Program inovasi Teknologi Informasi itu memiliki esensi positif sebagai jendela memperoleh informasi dunia. Program *Cyber City* juga berperan sebagai jawaban dari tingginya peningkatan keperluan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat.

Manfaat *Cyber City* bagi masyarakat di antaranya yaitu:

1. Komunikasi data, yaitu memungkinkan adanya komunikasi data antar masayarakat, namun yang paling utama adalah komunikasi data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kantor Pemerintahan lainnya.
2. Pelayanan publik, yaitu semakin baiknya kinerja setiap SKPD akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat deengan jaringan komunikasi data yang luas, dan juga kemudahan mengakses data, pelayanan terhadap masyarakat pun akan semakin baik.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pembangunan *Cybe City* dengan jaringan berkapasitas besar dapat melalui kerjasama dengan pihak swasta dan digunakan secara maksimal dalam sisi bisnis. Masyarakat bahkan secara individu dapat membuka peluang-peluang usaha atau

membuka distribusi yang lebih besar melalui internet. Pemanfaatan ini tentu saja bisa mendatangkan PAD.

4. Menarik investor, yaitu dengan kemudahan akses data yang valid tentang sebuah kota, akan memudahkan investor untuk merencanakan pengembangan bisnisnya di kota tersebut.
5. Pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, peran teknologi sangat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih maju juga akan membawa masyarakat pada peradaban kehidupan yang juga lebih baik.

Penerapan Konsep Cyber City ini sebagai bagian dari perwujudan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X (a) Hak Asasi Manusia Pasal 28F, yaitu:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, pembangunan *Cyber City* bermakna suatu kota yang memiliki infrastruktur yang mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap baik kuantitas dan kualitasnya dari sistem yang digunakan maupun keterpaduan komponen sistem yang ada dalam kota tersebut.

Kerangka Pemikiran

Studi penelitian ini menggunakan teori gaya kepemimpinan dari Veithzal Rivai dengan judul *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* dimana gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu pelaksanaan tugas, hubungan kerja sama dan hasil yang dapat dicapai, karena teori ini cocok untuk menunjang penelitian ini, dengan karakter seseorang yang berbeda-beda memberikan pengaruh cukup besar terhadap pola dan perilaku kepemimpinan seseorang.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penelitian tentang gaya kepemimpinan seseorang dalam menjalankan organisasi, kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan dalam menjalankan suatu organisasi. Organisasi tanpa adanya pemimpin tidak akan berjalan dengan baik, sosok pemimpin diperlukan untuk membentuk menggerakan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan bersama.

Pemimpin akan bersikap otoriter apabila diperlukan, pemerintah Kota Cimahi akan menerapkan sikap otoriternya dalam mengambil keputusan dan tidak mengikutsertakan pengikut atau bawahannya dalam proses pengambilan keputusan tersebut baik itu saran dalam proses pembangunan

Cimahi *Cyber City*, maupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Koordinasi maupun komunikasi antar lembaga atau partisipasi dari aparatur, instansi atau SKPD lain akan terwujud apabila pemerintah kota Cimahi menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif baik.

Teori gaya kepemimpinan yang dipakai oleh peneliti untuk menyusun skripsi ini dapat dilihat dari:

a. Pelaksanaan tugas yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota cimahi dalam melaksanakan pembangunan Cimahi *Cyber City* yang terdiri dari:
    1. Perencanaan pembangunan yaitu sebuah langkah awal pemerintah Kota Cimahi dalam Pembangunan Cimahi *Cyber City*.
    2. Pengembangan pembangunan yaitu suatu proses pelaksanaan pembangunan yang telah ada namun efektifitasnya berkurang karena tuntutan zaman yang setiap hari semakin kuat dalam mempengaruhi kehidupan sehingga perlu adanya pengembangan lebih lanjut oleh pemerintah.
    3. Pelaksanaan keputusan, merupakan tindakan akhir pemerintah Kota Cimahi setelah melaksanakan berbagai macam pertimbangan yang berdasarkan terhadap kebutuhan serta tuntutan zaman yang setiap saat harus dilaksanakan.

b. Hubungan kerjasama merupakan aktifitas yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin terhadap antar instansi atau lembaga mengenai koordinasi serta komunikasi melaksanakan pembangunan Cimahi *Cyber City* yang meliputi antara lain:
    1. Koordinasi merupakan langkah-langkah atau upaya pemerintah Kota Cimahi untuk melaksanakan pembagian kerja terhadap para aparaturnya maupun instansi atau lembaga yang mempunyai keterkaitan dalam pembanguan Cimahi *Cyber City*, koordinasi ini meliputi antara lain:
        a. Pengerahan yaitu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi dalam mengarahkan aparatur maupun instansi atau lembaga sesuai dengan tugas dan pokonya masing-masing terkait dengan pelaksanaan pembangunan Cimahi *Cyber City*.
        b. Pengintegrasian yaitu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi terhadap pembangunan Cimahi *Cyber City* dengan menghubungkan instansi atau lembaga yang terlibat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Komunikasi merupakan aktifitas menjalin hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi dengan instansi maupun lembaga yang terlibat dalam pembangunan Cimahi *Cyber City*, komunikasi ini terdiri dari:
    a. Informasi yaitu cara pemerintah Kota Cimahi dalam memahami setiap informasi yang didapatnya mengenai pembangunan Cimahi *Cyber City*
    b. Komunikasi organisasi merupakan hubungan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi menjalin hubungan dengan mitra kerjanya dalam pelaksanaan pembangunan Cimahi *Cyber City*.
    c. Komunikasi individu yaitu komunikasi yang dilaksnakan oleh pemerintah Kota Cimahi dengan para aparaturnya menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan Cimahi *Cyber City*.
3. Hasil yang dicapai merupakan gambaran dari pencapaian pembangunan Cimahi *Cyber City* yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Hasil yang dicapai ini dapat dilihat dari:
    1. Efektifitas yaitu pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* dengan cara yang efektif dan efisien sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal, antara lain:
        a. Sumberdaya merupakan suatu yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cimahi baik itu berupa Sumber Daya Manusia maupun secara finansial dalam pelaksanaan pembangunan Cimahi *Cyber City*.
        b. Sarana merupakan alat bantu jangka pendek yang penunjang telaksananya pembangunan Cimahi *Ciber City* termasuk aparaturnya agar pelaksanaan pembangunan selesai tepat pada waktunya.

c. Prasarana merupakan alat bantu jangka panjang yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk menunjang pelaksanaan pembanguan Cimahi *Ciber City* agar dapat terlesaikan dengan tepat waktu.

2. Kepuasan yaitu pemenuhan kebutuhan dan harapan yang dibuat oleh pemerintah dalam membangun Cimahi *Cyber City*, peneliti membagi kepuasan menjadi 2 yaitu antara lain:
   a. Kepuasan aparatur yaitu kepuasan kerja yang rasakan oleh para aparatur terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah kota Cimahi mengenai pembangunan Cimahi *Cyber City*.
   b. Kepuasan masyarakat yaitu kepuasan yang rasakan oleh para masyarakat Kota Cimahi terhadap pemerintah kota Cimahi mengenai pembangunan Cimahi *Cyber City*.

Adanya konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* sudah jelas bahwa Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pembangunan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, jika pemerintah maupun SKPD mensosialisasikan konsep pelaksanaan Cimahi *Cyber City* maka masyarakat akan tahu bahkan akan faham terhadap apa yang sedang dicanangkan oleh kepala daerah mengenai Cimahi *Cyber City* maka hasil yang di capai akan memuaskan masyarakat. Maka visi Kota Cimahi yaitu "Menuju Cimahi Cerdas" akan tercapai dan berjalan dengan baik, sehingga capaian tersebut akan sesuai dengan cita – cita dan harapan kepala daerah Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perencanaan pelaksanaan penelitian dengan cara memilih data, mengumpulkan data, dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu.

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Penelitian

dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang gaya kepemimpinan pemeirntah Kota Cimahi membangun Cimahi *Cyber City*.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive.* Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka, Studi lapangan (Observasi, Wawancara, Dokumentasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Onjek Penelitian

Visi Kota Cimahi yaitu menuju Kota Cimahi C.E.R.D.A.S. dengan kepanjangan dari *Creative* (kreatif), Egaliter *(egaliterian)*, Responsif *(responsive)*, Dinamis *(dinamic)*, Agamis *(religious)* dan Sinambung *(sustainable)*. Untuk mewujudkan Visi tersebut pemerintah berserta elemen aparatur pemerintah maupun masyarakat Kota Cimahi harus memahami makna dari Visi tersebut:

1. Dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif.
2. Memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita.
3. Sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen.
4. Sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun.
5. Sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang.
6. Tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Oleh karena itu visi Cimahi Kota "CERDAS" adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2012 – 2017 tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan kreatifitas dalam segala bidang.
b. Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan publik.
c. Meningkatkan kemampuan dalam menanggapi tantangan, tuntutan dan kondisi masyarakat.

d. Mempertahankan dinamika perikehidupan dalam pembangunan.
e. Mewujudkan keshalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia.
f. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Kepala Daerah Kota Cimahi

Kepala daerah Kota Cimahi saat ini yaitu Wakil Walikota yang bernama Bapak Drs. H. Sudiarto., S.E.,Ak. beliau menjabat sebagai kepala daerah setelah yang menggantikan Walikota yang terkena kasus dugaan tindak pidana korupsi pada desember tahun 2016, beliau merupakan Wakil Walikota Cimahi yang ke 3 serta menjabat pada periode 2012-2017.

Sudiarto lahir di Kutoarjo pada 10 Oktober 1949, kutoarjo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administrastif Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia memulai pendidikan Sekolaha Dasar di SDN Tulusrejo, Kutoarjo setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang tempat di SMPN 1 Kutoarjo. Tamat di jenjang pendidikan SMP, beliau menalnjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yang bertempat di SMAN 1 Purworejo.

Karirnya di partai Golkar pun cukup meningkat, karena beliau rajin dan loyal dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang penting dari partainya seperti Karakterdes Partai Golkar Tahun 1986, Diklat Kader Partai Golkar Tahun 2002, Diklat Fungsionaris Partai Golkar Tahun 2008. Karir pekerjaan beliau bermula dari Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Dustira (Kesdam Siliwangi) Kota Cimahi. Nama beliau di daerah Jawa Barat khususya di daerah Bandung Raya bukanlah nama yang asing dikalangan unsur pemerintahan, setelah lepas dari pekerjaannya sebagai PNS beliau terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Bandung hingga akhirnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung.

Setelah beres menjabat di Kabupaten Bandung beliau mencoba peruntungannya di Kota Cimahi dengan mencalonkan diri kembali menjadi salah satu kandidat calon DPRD dan akhirnya beliau anggota DPRD Kota Cimahi, pada tahun 2012 beliau di ajak oleh Ibu Atty Suharti Tochija untuk mendampiginya sebagai Wakil Walikota Cimahi.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kota Cimahi

Peneliti memilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi untuk menjadi salah satu objek perencanaan dan pembangunan Kota Cimahi berada pada tugasnya Bappeda. Musrenbang menjadi sala satu program bappeda dalam upaya perencanaan pembangunan Kota Cimahi yang sesuai bersumber dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Cimahi, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kota Cimahi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota sebagai kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu produk yang di kelola oleh Bappeda dalam menunjang berjalannya pemerintahan terhadap masyarakat yaitu adanya *website* yang bernama Simrenda (Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi) dengan alamat yaitu simrenda.cimahikota.go.id. simrenda menampung aspirasi pembangunan Kota Cimahi dari masyarakat mulai tingkat RW (Rukun Warga) hingga tingkat Kepala Daerah, dengan tujuan perencanaan pembangunan Kota Cimahi dapat di pantau dan dikawal langsung oleh semua masyarakat mulai dari tingkat RW hinga tingkat Kepala Daerah dengan transparan dalam pelaksanaanya Bappeda memfasilitasi masyarakat mulai dari RW agar mejadi kader pembangunan Kota sehingga masyarakat dapat meng-*input* langsung usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) melalui *website* Simrenda.

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Sebelum menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) pada saat ini, lembaga pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengalami beberapa perubahan struktur organisasi mengikuti arah perkembangan zaman yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, sejak tahun 2001 lembaga pengelola TIK ini dijalankan oleh Dainfokom (seksi pengumplan dan pengolahan data) berdasarkan perda nomor 2 tahun 2003 tentang SOTK, 9 tahun kemudian Dainfokom berubah nama menjadi Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) dan pengelolaan TIK di Kota Cimahi di tangani oleh seksi Penglolaan Data Elektronik sesuai dengan perda nomor 9 tahun 2008 tentang Lemtekda dan KPPT, pada tahun 2010 perda nomor 9 tahun digantikan oleh perda nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Perda nomor 9 tahun 2008 tentang Lemtekda dan KPPT hingga tahun 2016. Menginjak tahun 2017 KAPPDE berubah nama menjadi Diskominfoarpus dan pengelolaan TIK di Kota Cimahi di bawah Bidang Penyelenggaraan *E-Goverrntment* dan Persandian yang diatur oleh Perda nomor tahun 2016 dan Perwal nomor 33 2016.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) yaitu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.

Gambaran Umum Cimahi Cyber City

Sejak Cimahi menjadi pemerintahan kota semenjak tahun 2001, telah dirasakan bahwa industri yang berkembang sudah tidak mendapatkan lagi dukungan sumber daya alam sehingga pada tahun 2004 pemerintahan Kota Cimahi melakukan riset bekerja sama dengan Institut Teknlogi Bandung (ITB), yang merekomendasikan bahwa Kota Cimahi harus mengembangkan Teknologi Informasi. Sehingga pada tahun 2005 yaitu pada masa pemerintahan mantan walikota Itoc Tochija dideklarasikan "Cimahi *Cyber City*".

Namun pada perkembangannya pada tahun 2009 hasil riset yang dilakukan oleh PT. Sembilan Matahari merekomendasikan bahwa Kota Cimahi harus mengembangkan Animasi dan Film. Sejalan dengan perkembangan di dunia dengan fenomena Industri Kreatif, maka Pemerintah Kota Cimahi mendeklarasikan untuk mengembangkan Industri Kreatif dengan 3 bidang utama yaitu : Animasi, ICT, dan Film. Hal tersebut di dukung oleh sumber daya manusia dan potensi pasar yang besar. Maka untuk mendukung rencana tersebut pemerintah kota melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Industri Kreatif yang pertama yang tujuannya menghimpun pelaku kreatif. Ternyata hasilnya cukup menjanjikan karena jumlah pelaku kreatif cukup signifikan dan memiliki kemampuan yang baik.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota Cimahi Membangun Cimahi *Cyber City*

Pelaksanaan pembangunan daerah harus berlandaskan pada rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi, potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki Kota Cimahi serta cita-cita di masa depan, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi 2005 – 2025, yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui tahapan yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai unsur pertama di dalam program pengembangan umum Kota Cimahi guna mencapai tujuan Pembangunan Jangka Panjang terutama di bidang Teknologi Informasi khususnya pembangunan Cimahi *Cyber City* haruslah berpijak pada dua prinsip pokok yaitu sifatnya yang komprehensif dan dinamis. Sifat yang komprehensif disebabkan karena seluruh program pembangunan Kota Cimahi yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi yang mampu untuk melaksanakannya.

Pembangunan Kota Cimahi khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi haruslah dinamis sesuai dengan dinamika yang hidup di dalam masyarakat yang semakin tinggi mutu kehidupannya dan tingkat pemikiran

rakyatnya, dinamika masyarakat yang semakin meningkat menuntut pemerintah Kota Cimahi harus melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk memberdayakan masyarakat dan mengikutsertakan dinamika masyarakat dalam pembangunan Cimahi *Cyber City*, hal ini berarti pula bahwa proses perencanaan harus rentan pada perubahan yang hidup di dalam kehidupan yang nyata dan bukan merupakan rekayasa dari atas atau pemerintah, meskipun tidak seluruhnya rekayasa pemerintah bersifat negatif tetapi dinamika menuntut suatu hasil yang serasi antara tuntutan pemerintah pusat dengan keikutsertaan masyarakat banyak.

Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya membangun Cimahi *Cyber City* membuat perencanaan pembangunan hanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui tahapan yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dituangkan dalam visi dan misi pemerintah Kota Cimahi dalam satu periode. Wacana konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* sudah dicanangkan sejak tahun 2005 oleh mantan Walikota Cimahi Itoch Tochija tetapi sampai saat ini belum dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota, hal ini sangat disayangkan karena kekuatan hukumnya masih lemah. Namun dalam visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi, membuat pembangunan Cimahi *Cyber City* menjadi berkelanjutan dan tidak terputus.

Meskipun dalam perencanaan pembangunan Cimahi *Cyber City* dapat dikatakan belum maksimal, namun dengan adanya konsep tersebut dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan terhadap masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Wakil Walikota Cimahi, bapak Drs. Sudiarto, SE.Ak.

> "Sebelum konsep Cimahi *Cyber City* dicanangan, pengelolaan program/kegiatan dan pelayanan publik pada umumnya masih bersifat konvensional/manual. Namun seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran dalam pelaksanaan pekerjaan dibeberapa sektor/bidang termasuk pelayanan publik yang beralih dari pola manual menjadi berbasis TIK, manfaatnya pekerjaan pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan *real time*" (13/02/2017).

Dengan demikian dengan adanya konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* dapat dirasakan secara langsung oleh aparatur pemerinthan Kota Cimahi, SKPD yang lebih berperan penting dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* yaitu Diskominfoarpus serta Bappeda, keduanya sangat berperan penting didalamnya karena semua perencanaan dan pembangunan Kota Cimahi berada di tugas pokok dan fungsinya Bappeda, strategi perencanaan pembangunan Bappeda membuat program berbasis *website* dengan nama Simrenda (Sistem Pembangunan dan Perencanaan

Daerah) dengan adanya Simrenda ini masyarakat menjadi kader pembangunan yang direkrut dari setia RW (Rukun Warga) dan dilatih yang nantinya kader tersebut akan menjadi agen atau mitra pemerintah Kota Cimahi dalam perecanaan pembangunan sehingga usulan-usulan musrenbang dapat dipantau pelaksanaannya oleh seluruh masyarakat Kota Cimahi mulai dari tingkat RW, Keluraha, Kecamatan dan Kota, apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kekeliruan maka kader tersebut atau masyarakat dapat meluruskannya atau mengingatkan pemerintah.

Namun sayangnya ikon Cimahi *Cyber City* yang sekaligus direncanakan menjadi pusat pengembangan bisnis berbasisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu BITC *(Baros Infoemastion Technology Creative)* sampai saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Kota Cimahi, kawasan Baros telah dipersiapkan sebagai pusat pengembangan bisnis tersebut belum mampu menunjukan progresnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota, khususnya ekonomi berbasis TIK karena kendala Sumber Daya Manusia yang belum siap dengan demikian, apabila SDM masyarakat belum siap menghadapi kemajuan dan tuntutan zaman, maka pemangunan Cimahi *Cyber City* hanya akan menjadi wacana.

Selain simrenda dan pesduk, diskominfo mengelola sebanyak 65 aplikasi atau *website* yang tujuan dan fungsinya untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan, sehingga dengan dikembangkannya layanan berbasis *online* ini menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin moderen tetapi melihat pada kondisi secara komprehensif terkait petensi Cimahi *Cyber City* yang relatif belum siap untuk dikembangkan, maka Kota Cimahi saat ini lebih mengarah kepada pengembangan Cimahi sebagai kota kreatif.

Terdapat 4 klaster ekonomi yang akan menjadi prioritas pengembangan, yaitu: pertama, klaster telematika dan animasi merupakan sektor yang dibentuk untuk mengembangkan industri keratif yang berorientasi pada teknologi informasi dan komunikasi; kedua, klaster kuliner yaitu terdiri dari makanan dan minuman, sektor ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan karena kuliner merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan dapat menjadi salah satu pemasukan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi; ketiga, klaster tekstil dan produk tekstil *(fashion)*, mengingat wilayah Kota Cimahi terdapat industri tekstil maka sektor *fashion* menjadi salah satu andalan bagi Kota Cimahi yang harus dikembangkan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin; keempat, klaster kerajinan, hal ini perlu di kembangkan karena produk kerajinan masyarakat Kota Cimahi sudah banyak di sebar ke seluruh wilyah jawa barat bahkan luar pulau seperti kerajinan boneka yang terdapat di wilayah Cihanjuang yang produknya sudah tersebar di berbagai wilayah.

Apabila pemerintah Kota Cimahi hanya mengandalkan dari

sektor Sumber Daya Alam, maka pendapatan asli daerah atau pemasukan *cash* Kota Cimahi tidak akan maksimal karena mengingat wilayah Kota Cimahi di dominasi oleh perumahan, pabrik serta lahan yang ditempati oleh TNI yang sudah jelas bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik negaradan pemerintah Kota Cimahi tidak berwenang mengubah fungsi lahan tersebut meskipun untuk kepentingan umum.

Klaster telematika dan animasi yang ada awalnya sebagai cikal bakal pengembangan Cimahi *Cyber City* akan didorong lebih dengan harapan dapat menjadi motivasi bagi pengembangan klaster ekonomi sebagai ikatan yang saling berkaitan dan saling mendukung, dengan demikian diharapkan akan memberikan daya saing yang lebih besar dan dan luas terhadap upaya pengembangan ekonomi kreatif. Untuk merwujudkan hal tersebut, pemeirntah Kota Cimahi membangun gedung *Techno Park* serta akan mengoptimalkan gedung BITC yang telah ada. Kedua gedung tersebut akan menjadi bisnis pengembangan ekonomi berbasis kreatifitas dan inovasi yang diharapkan mampu menghasilkan wirausaha baru, SDM professional dan produk yang dapat diunggulkan di Kota Cimahi.

Bappeda dan Diskominfoarpus sebagai SKDP yang melaksanakan keputusan untuk menjalankan salah program yang mendukung terealisasinya Cimahi *Cyber City* harus konsisten, karena Bappeda yang berfungsi sebagai perencana pembangunan dan Diskominfoarpus yang berfungsi sebagai salah satu *leading sector* dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* menjadi penentu pembangunan, dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Diskominfoarpus menjadi sebuah kemajuan bagi Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SKPD.

Adanya produk atau sistem berbasis teknologi informasi komunikasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah Kota Cimahi seperti: Pesduk, Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian), SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), Simrenda (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah), SIRUP (Sistem Informasi Manajemen Rencana Umum Pengadaan), Simkel (Sistem Informasi Kelurahan), *E-Reporting* (Sistem pelaporan berbasis *website*), pelayanan administrasi kependudukan secara *online*, Sistem Monitoring PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Sistem Informasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), Sistem Informasi Direktori Bisinis berbasisi *website* dan sebagainya merupakan beberapa bukti bahwa pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh SKPD terkait berjalan optimal, namun sangat disayangkan ketika pemerintah kota Cimahi dengan gencarnya menggaungkan pembangunan Cimahi Cyber City tetapi masyarakat Kota Cimahi belum seluruhnya mengetahui inovasi-inovasi tersebut.

Pelaksanaan konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* secara umum, yang menjadi *point* penting dalam berjalannya tugas pembangunan *Cyber City* yaitu dukungan yang dilakukan oleh

kepala daerah menjadi hal yang sangat penting, pada tahun 2015 pemerintah daerah telah melakukan *launching* Simrenda (Sitem Informasi Pembangunan Daerah) yang menjadi salah satu konsep transparansi perencanaan, anggaran, dll yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat Kota Cimahi dengan memakai layanan internet.

Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Oleh Pemerintah Kota Cimahi Membangun Cimahi *Cyber City*

Kerjasasma merupakan hubungan antar kelompok atau orang agar tercapainya tujuan dari suatu oganisasi, hubungan kerjasama akan terlaksana dengan baik apabila ada koordinasi. Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.

Koordinasi dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan Cimahi *Cyber City*.
2. Untuk mencegah konflik antar instansi atau kelompok atau perorangan dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan pembangunan Cimahi *Cyber City* melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* di kalangan unit kerja agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Pemerintah Kota Cimahi pernah melakukan kerjasama dengan negara jepang, tepatnya dengan Kota Hamamatsu pada tahun 2012. Walikota Cimahi menandatangani kerjasama pertukaran pelajar yang pada saat itu pelajar Kota Cimahi berasal dari perwakilan SMA Negeri 2 Kota Cimahi, penandatanganan surat kerjasama tersebut disaksikan oleh para guru dan siswa SMAN 2 Cimahi, beberapa pelajar SMA Hamamatsu, serta sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Siswa yang menjadi perwakilan pertukaran pelajar tersebut diharapkan dapat membawa ilmu yang didapatnya di jepang serta memberikan efek motivasi bagi siswa lainnya di Kota Cimahi serta dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Cimahi yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah Kota Cimahi belum dapat melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak pengelola BITC *(Baros Information Technology Creative)*. Pembangunan Cimahi *Cyber City* yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai ikon sekaligus pusat pengembangan bisnis berbasisi

Teknolgi Informasi dan Komunikasi (TIK) sampai saat ini progesnya dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kawasan Baros yang telah dipersiapkan sebagai pusat pengembangan bisnis tersebut belum mampu menunjukan geliatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota, khususnya ekonomi berbasis TIK.

Terkait dengan Pembangunan Cimahi *Cyber City*, pemerintah Kota Cimahi melakukan sosialisasi kepada pemerintah melalui media cetak, media elektronik maupun terjun langsung kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan kelurahan/kecamatan agar dapat bertatap muka langsung dengan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara langsung. Salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* belum dapat memeberikan efek manfaat secara luas karena SDM masyarakat Kota Cimahi belum siap dalam memanfaatkan TIK dalam beragai aspek kehidupan, hal ini menjadi tugas besar pemerintah Kota Cimahi terkait penyebaran informasi dan sosialisasi konsep pembangunan Cimahi *Cyber City*.

Komunikasi organisasi yang diterapkan kepala daerah terhadap bawahannya dilakukan secara langsung maupun melalui sekretaris daerah. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap bapak Hendra Wijayanto dari Bappeda bagian program pelaporan mengatakan bahwa:

"apabila ada instruksi maupun hal lainnya yang berurusan dengan SKPD kepala daerah menginstruksikan langsung atau melalui sekretaris daerah kepada kepala dinas terkait untuk menyampaikan informasi yang akan disampaikan" (01/02/2017).

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi individu yang dilakukan oleh Kelapa Daerah/ Wakil Walikota Cimahi bapak Drs. H. Sudoarto, SE.Ak sangat bersahaja, hal ini dirasakan langsung oleh peneliti, dengan jabatannya sebagai pejabat daerah, beliau sangat bersahabat dengan siapapun, dengan pengalamannya beliau yang pernah menjabat sebagai DPRD selama kurang lebih 13 tahun beliau sangat faham terhadap komunikasi yang seharusnya diterapkan oleh beliau dengan gayanya yang sederhana dan bersahabat membuat siapapun tidak merasa canggung dengan beliau.

Hasil Yang Dicapai Oleh Pemerintah Kota Cimahi Membangun Cimahi *Cyber City*

Kota cimahi dengan lahan yang sangat sempit tidak memungkinkan untuk pemerintah memanfaatkan Sumber Daya Alamnya secara maksimal sehingga upaya pemanfaatan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu strategi dalam pembangunan Kota Cimahi terutama dalam pembangunan Cimahi *Cyber City*, berdasarkan hasil wawancara kepala daerah menerangkan bahwa:

> "konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* belum memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, kendala yang dialami diantaranya sumber daya masyarakat Kota Cimahi

belum siap dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan ".(12/02/2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat Kota Cimahi yang bernama Darman Maulana yang bertempat dilingkungan masjid agung Kota Cimahi, beliau menjelaskan bahwa ia pernah memanfaatkan *hot spot* secara gratis yang bisa digunakan oleh siapapun selama beberapa tahun kebelakang yang terpasang di lingkungan masjid agung Kota Cimahi dari Diskominfo Jawa Barat, namun pada awal tahun 2017 *hot spot* sudah tidak lagi terpasang.

Pemanfaatan prasarana dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* pun belum memberikan manfaat yang kepada masyarakat secara luas salah satuya gedung yang menjadi salah satu simbol pembanungan Cimahi *Cyber City* yang dibangun dikawasan Baros yang bernama *Baros Information Technology Cerative* (BITC) belum termanfaatkan secara optimal sebagai pusat pengebangan bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

a. Kepuasan aparatur Pemerintah Kota Cimahi Membangun Cimahi *Cyber City*

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti ketika berada di tempat kerja aparatur pemerintah dari Bappeda dan Diskominfoarpus kepuasan kerja mereka terbilang cukup terpenuhi karena dalam melaksanakan pekerjaannya mereka mempunyai sarana seperti seperti komputer maupun meja kerja yang khusus dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya, didalam ruangan kerja pun suasana kekeluargaan sangat terasa, meskipun jabatan dan posisi mereka berbeda tetapi tidak menghilangkan rasa kebersamaan yang setiap hari tercipta diruangan kerja.

Tetapi pemerintah Kota Cimahi kurang mengapresiapsi kinerja aparaturnya seperti penghargaan atau *reward* terhadap aparatur teladan pun hanya dilakukan setiap 10 tahun dalam satu kali, hal ini dapat mengurangi motivasi kinerja aparatur pemerintahan. Untuk ukuran pemerintah daerah, pemberian penghargaan yang dilakukan hanya setiap 10 tahun dalam satu kali sangat kurang, karena kepala daerah pun hanya menjabat selama 5 tahun.

b. Kepuasan masyarakat dalam Pembangunan Cimahi *Cyber City*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti diperoleh dari informan masyarakat Kota Cimahi, dengan adanya pembangunan Cimahi *Cyber City*, pemerintah belum dapat membuat sebagian besar masyarakat puas akan kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi, karena pembangunan Cimahi *Cyber City* dinilai hanya untuk masyarakat yang mengerti penggunaan teknologi informasi, serta pembangunan seperti jalan rusak pun belum ditanggapi secara cepat, oleh karena itu salah satu harapan masyarakat ketika pembangunan Cimahi *Cyber City* berjalan dengan baik, maka infrastruktur seperti jalan rusak dan sebagainya harus cepat ditanggapi oleh pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari *website* unpad.ac.id,

survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Kepakaran Statistik (PK2S) Unpad yang diketuai oleh Dr. Toni Toharudin, M.Sc. pada 15-31 Oktober 2015 menyatakan, beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat belum memiliki kinerja pemerintahan yang baik. Survei tersebut didasarkan pada kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di kota/kabupatennya, yang dinilai 6 aspek kinerja, yaitu infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, pelayanan dasar, anggaran, dan sumber daya aparatur. Hasil dari penilaian tersebut ada 5 kota dengan indeks kepuasan responden tertinggi, yaitu Sukabumi (100,00), Purwakarta (93,71), Tasikmalaya (91,12), Banjar (87,99), dan Bogor (87,69). Sedangkan kota dengan nilai indeks terendah yaitu Sumedang (10,08), Cianjur (15,21), Cimahi (32,98), Depok (37,27), dan Subang (45,17).

Posisi Kota Cimahi sebagai kota dengan indeks kepuasan masyarakat terendah ke tiga, merupakan salah satu bahan evaluasi untuk pemerintah Kota Cimahi agar dapat lebih meningkatkan kinerja aparaturnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menunjang pembangunan *Cimahi Cyber City*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pemerintah Kota Cimahi dalam membangun Cimahi *Cyber City* dinilai masih belum maksimal karena dalam sebuah program, pemerintah Kota Cimahi belum membuat peraturan yang berupa Perda maupun Perwal yang dapat menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tetapi perencaan yang tersusun dari RPJMD hingga dituangkan dalam visi dan misi Walikota Cimahi serta pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan, pengembangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pelayanan publik merupakan suatu inovasi yang sangat baik untuk ukuran daerah yang hanya memiliki 3 kecamatan serta Sumber Daya Alam yang minim serta pelaksanaan keputusan yang baik sesuai dengan aturan membuat aparatur pemerintah Kota Cimahi dapat fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan, namun belum ada produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kota Cimahi dalam Konsep pembangunan Cimahi *Cyber City*.
2. Hubungan kerjasama yang dilaksanakan pemerintah Kota Cimahi terkait pembangunan Cimahi *Cyber City* merupakan salah satu langkah pemerintah agar tujuan pembangunan dapat tercapai, koodinasi dengan pengerahan masyarakat dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Kota Cimahi, pengintegrasian seluruh SKPD melalui sistem informasi pun sudah dilaksnakan untuk memudahkan aparatur memperoleh informasi antar SKDP dengan cara cepat serta penyampaian informasi dan komunikasi yang telak baik dilakukan oleh kepala daerah

baik secara organisasi maupun individu. Namun dalam sosialisasi adanya konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* pemerintah Kota Cimahi belum maksimal karena masih ada masyarakat yang belum faham dengan konsep tersebut yang disebabkan masyarakat belum faham tahu akan penggunaan TIK dalam aspek kehidupan.

3. Hasil yang dicapai oleh pemerintah Kota Cimahi dalam membangun Cimahi *Cyber City* masih terlihat banyak kekurangan mulai dari Sumber Daya masyarakat yang belum siap akan berkembangnya teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan, sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga menyebabkan tersendatnya pembangunan Cimahi *Cyber City* serta masih rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Kota Cimahi karena dinilai hanya menguntungkan beberapa pihak saja atau masyarakat yang faham akan teknologi informasi dan komunikasi serta pembangunan Cimahi *Cyber City* belum diimbangi dengan pembangunan infrstruktur dan sarana pendukung. Serta pemeritah Kota Cimahi belum dapat mengapresiasi kinerja aparaturnya dengan baik karena penghargaan terhadap aparaturnya hanya dilakukan 10 tahun dalam satu kali, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pun belum di buat oleh pemerintah Kota Cimahi, hal ini sangat penting agar pemerintah dapat lebih memperbaiki kinerja sesuai dengan harapan masyarakat Kota Cimahi.

Saran

1. Pemerintah Kota Cimahi seharusnya membuat produk hukum baik dalam bentuk Perda maupun Perwal dan sebagainya tentang konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* agar pembangunan dapat lebih terarah.
2. Hubungan kerjasama serta komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak swasta maupun masyarakat harus lebih ditingkatkan agar pembangunan Cimahi *Cyber City* dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat.
3. Pemerintah Kota Cimahi sebaiknya meningkatkan Sumber Daya masyarakatnya agar dapat lebih memahami pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di berbagai aspek kehidupan misalnya dengan cara mengadakan pelatihan IT atau semacamnya yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta sarana dan prasarana penunjang kebutuhan dalam pembangunan Cimahi *Cyber City* sebaiknya dapat lebih dimaksimalkan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak luar agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik sehingga kepuasan masyarakat pun akan terpenuhi serta diharapkan dengan adanya konsep pembangunan Cimahi *Cyber City* pembangunan infrastruktur seperti jalan, dan lain-lain dapat

terlaksana dengan baik. Sebaiknya pemerintah Kota Cimahi mengadakan penilaian aparatur terbaik untuk mengapresiasi kinerja aparaturnya dengan kurun waktu minimal 1 tahun dalam satu kali, hal ini sangat penting agar aparatur dapat bekerja dengan lebih baik dan dapat memotivasi aparatur yang lainnya serta pemerintah Kota Cimahi diharapkan mempunyai atau membuat indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Cimahi agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk meingkatkan kualitas kinerja pemerintahan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFAR PUSTAKA

BUKU

Arep, Ishak dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Motivasi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.

Gerungan, W.A. 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, IKAPI

Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Herujito. 2006. *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo

Indrajit. 2002. *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta:PT Elek Media Komputindo.

Kartono. 2003. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Munawar. 2006). *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju

Riva'i, Muliaman dan Mansyur. 2014. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Ed.4*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie,. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Thoha. 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tjahjanto. 2003. *E-government, tehnologi Informatika dan Implementasinya pada Sektor Pemerintahan, dalam Good Governance dan Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Prosumen dengan FORKOMA MAP UGM.

Siagian, P. Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

DOKUMEN – DOKUMEN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

RUJUKAN ELEKTRONIK

Ririn. 2014. Pencapaian Cimahi Cyber City tak Jelas. Melalui http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/12/07/307543/pencapaian-cimahi-cyber-city-tak-jelas[18/11/16].